



## Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung; Implementasi, Kendala dan Solusi

Agnes Eyne Banea<sup>1</sup>, Haliah<sup>2</sup>, Nirwana<sup>3</sup>, Syamsuddin<sup>4</sup>, Andi Kusumawati<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara Bitung,

<sup>2,3,4,5</sup> Universitas Hasanuddin Makassar

Surel: agnes.banea@gmail.com

### INFO ARTIKEL

JIAP Volume X  
Nomor 1  
Halaman 73-83  
Samata,  
Januari-Juni 2024

ISSN 2441-3017  
E-ISSN 2697-9116

Tanggal Masuk:  
**13 Juni 2022**  
Tanggal Revisi:  
**30 Juni 2022**  
Tanggal Diterima:  
**30 Juni 2022**

### ABSTRAK

Salah satu alat penting untuk modernisasi pemerintahan daerah adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Jika diterapkan dengan benar, SIPD dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik serta membantu pengambilan keputusan. Namun, keberhasilan implementasi SIPD sangat bergantung pada infrastruktur yang memadai, pelatihan sumber daya manusia, dukungan anggaran, dan kebijakan yang mendukung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi SIPD pada BPKAD Kota Bitung, kendala yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi kendala implementasi SIPD. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan studi Pustaka. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD pada BPKAD Kota Bitung telah sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan berdasarkan aspek teori implementasi telah berhasil. Kendala dalam implementasi SIPD pada BPKAD Kota Bitung antara lain koneksi internet tidak stabil dan keterlambatan respon dari Kemendagri.

**Kata Kunci :** SIPD; BPKAD; implementasi;

*One important tool for local government modernization is the Local Government Information System (SIPD). If implemented correctly, SIPD can improve the efficiency, transparency and quality of public services and aid decision-making. However, the successful implementation of SIPD relies heavily on adequate infrastructure, human resource training, budget support, and supportive policies. The purpose of this research is to find out how the implementation of SIPD at BPKAD Bitung City, the obstacles faced and solutions to overcome the obstacles to SIPD implementation. This research is a qualitative research with an explorative approach. The research data was collected through interviews and literature study. Furthermore, the data was analyzed using content analysis. The results showed that the implementation of SIPD at BPKAD Bitung City has been in accordance with Permendagri Number 70 of 2019 concerning Regional Government Information Systems and based on the theoretical aspects of implementation has been successful. The obstacles in the implementation of SIPD at BPKAD Bitung City include unstable internet connection and delayed response from the Ministry of Home Affairs.*

**Keyword:** SIPD; BPKAD; Implementation.

**Copyright:** Banena, A. Eyne., Haliah., Nirwana., Syamsuddin., Andi Kusumawardani (2024). Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung; Implementasi, Kendala dan Solusi Vol. X No. 1 (73-83). <https://doi.org/10.24252/jiap.v10i1.48023>

## PENDAHULUAN

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang berfungsi utama untuk membantu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dengan mengonversi data perencanaan daerah menjadi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan digunakan sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah (Vitriana et al., 2022). SIPD dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan data dan informasi terkait pembangunan daerah. Dengan membagi program SIPD menjadi beberapa tahap, pengguna di tingkat desa dapat mengelola berbagai jenis data, termasuk keluhan masyarakat, proposal, dan data terkait kegiatan desa. Setelah dikumpulkan di tingkat desa, data dan usulan dapat dikirim ke tingkat kabupaten untuk dibahas lebih lanjut. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) biasanya bertanggung jawab atas proses ini (Balqis et al., 2021; Ikriyati & Aprilia, 2019).

Sesuai dengan Pasal 391 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang dikelola dalam sistem informasi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), SIPD adalah sistem yang saling terhubung untuk mendukung pembangunan daerah dengan informasi keuangan, pembangunan, dan pemerintahan daerah. Salah satu tujuannya adalah membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih transparan. Ini berarti sistem menjadi lebih terbuka, sehingga tidak ada lagi celah untuk kecurangan atau penyelewengan (Alfani & Nasution, 2022; Chinda Aqhni Adisi & Abdul Sadad, 2022; Seputra, 2020).

Pemerintah daerah dapat menggunakan kemajuan teknologi untuk menjadi lebih baik dalam mengelola pemerintahan. Contohnya adalah pengelolaan keuangan dan perencanaan daerah, dimana teknologi sangat penting untuk proses pengelolaan pemerintahan. Jika teknologi pemerintah tersedia, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi (Karundeng et al., 2021; Seputra, 2020). Selain itu, memberikan kemudahan bagi pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang baik adalah cara untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya untuk mengembangkan pelaksanaan pemerintahan yang berbasis teknologi elektronik dikenal sebagai *e-government*. Teknologi ini digunakan untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat, serta urusan lain yang berkaitan dengan pemerintahan (Karundeng et al., 2021). Kebijakan ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mendorong pengembangan sistem data dan informasi pembangunan, informasi keuangan, dan informasi pemerintahan lainnya untuk membantu pengambilan keputusan di daerah dan pusat. Melalui kerjasama berbasis teknologi, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan membangun

database yang ada dan menunjukkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Selanjutnya, (Inzay et al., 2022) menyatakan bahwa tujuan penerapan SIPD dalam bentuk website adalah untuk memudahkan dan mempercepat pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik. Namun, pelaksanaan program ini sangat sulit, dan memerlukan kolaborasi, komunikasi, dan kerja sama dari semua bagian pemerintah daerah. Secara umum, sistem informasi pemerintah terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, dan karyawan yang bekerja bersama untuk membantu mengolah data dan menghasilkan informasi (Chinda Aqhni Adisi & Abdul Sadad, 2022). SIPD adalah pengelolaan informasi yang efektif dan metodis dengan prinsip efisiensi dan efektivitas untuk mencapai tujuan organisasi pada semua tingkatan pemerintah daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan SIPD adalah untuk memastikan bahwa semua orang dapat mengakses informasi publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menetapkan standar minimum yang harus dicapai oleh SIPD.

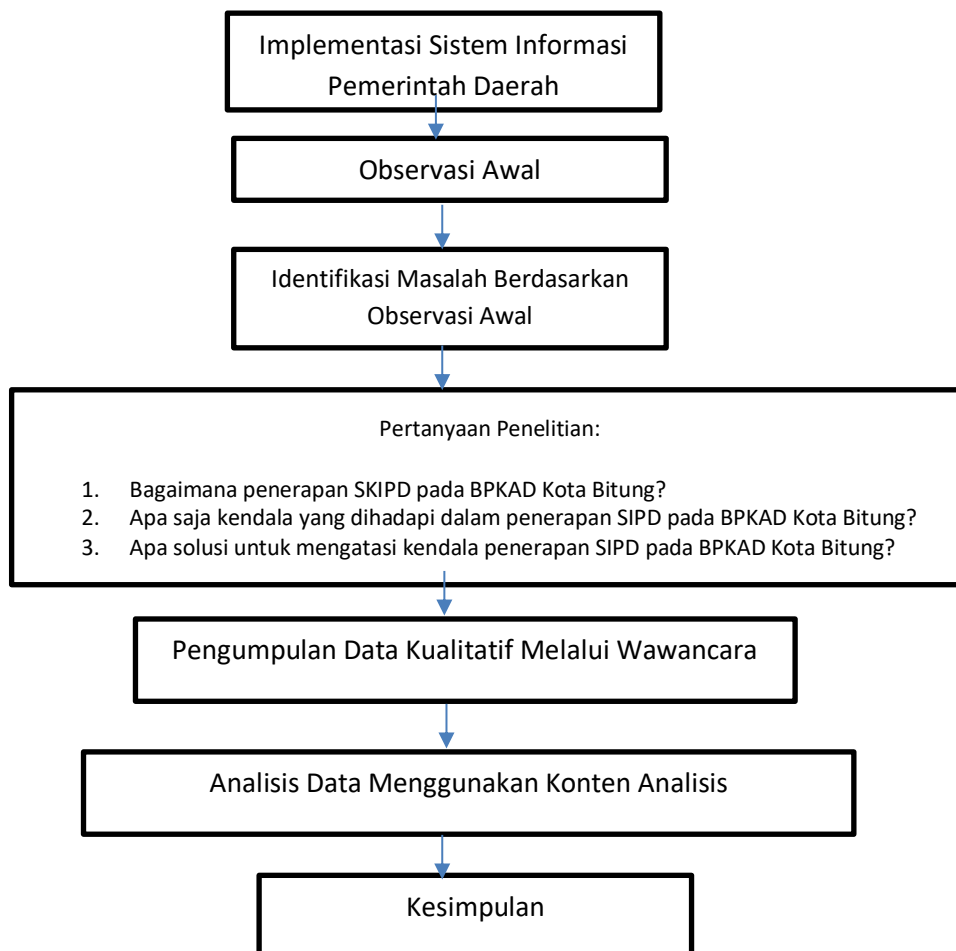
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan instansi pemerintahan yang melaksanakan urusan bidang keuangan dan telah menggunakan SIPD sejak tahun 2021. Sejak penerapan SIPD, BPKAD Bitung mengalami sejumlah peningkatan dan penurunan. Salah satu keunggulannya yang paling menonjol adalah kemampuan untuk melakukan perencanaan dimana pun dan kapan pun dengan koneksi internet yang dapat diakses. SIPD adalah inovasi yang mengintegrasikan berbagai proses pengendalian keuangan perusahaan, mulai dari tahap pembangunan hingga pengawasan, dengan tingkat integrasi yang sangat tinggi. Namun, implementasi SIPD juga menyebabkan sejumlah masalah bagi BKAD Bitung. Salah satunya adalah terkait dengan infrastruktur server yang berada di pusat. BKAD Bitung rentan terhadap gangguan jaringan yang tidak stabil karena bergantung pada server pusat. Jika masalah seperti ini muncul, proses perencanaan dan penganggaran akan terhambat.

Edward III (1980) mengatakan bahwa implementasi adalah tahap di mana suatu kebijakan diterapkan sepenuhnya untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. (Van Meter & Van Horn, 1975) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilakukan dengan melihat prosesnya, yaitu dengan melihat apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat tindakan program dari proyek individual dan kedua apakah tujuan program tercapai (Inzay et al., 2022; Mustaqmah & Putri, 2022). Implementasi kebijakan merupakan bagian penting dari proses kebijakan

publik. Sebuah kebijakan harus diimplementasikan melalui proses implementasi agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Pernyataan kebijakan, atau pernyataan kebijakan, yang terdapat dalam kebijakan yang diputuskan akan dilaksanakan melalui berbagai langkah konkrit, disebut implementasi setelah tahap formulasi kebijakan (Ikriyati & Aprila, 2019).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi SIPD pada BPKAD Kota Bitung, kendala yang dihadapi dalam implementasi SIPD dan solusi untuk kendala implementasi SIPD. Adapun model analisis penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:

**Gambar 1**  
**Model Analisis Penelitian**



Sumber: Olah konsep Penulis

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif merupakan metode penelitian ini. Pendekatan eksploratif dianggap cocok dalam penelitian ini karena belum diketahui bagaimana penerapan SIPD, kendala penerapan dan solusi untuk mengatasi masalah penerapan SIPD. Pendekatan ini dipilih karena data yang diperoleh akan lebih lengkap, mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Untuk memperoleh kredibilitas yang kuat dari penelitian ini, peneliti menggabungkan berbagai perspektif, yang dikenal sebagai triangulasi, dengan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan pada lima informan yang terkait langsung dengan penggunaan SIPD. Menurut (Sidiq & Chori, 2019), terdapat tiga tahapan penelitian: pra-lapangan, pekerjaan lapangan, dan analisis data. Peneliti mengikuti langkah-langkah ini selama proses pengambilan data. Untuk memastikan bahwa data penelitian ini telah sah maka digunakan triangulasi sumber dan waktu. Data dianalisis dengan *content analysis*, yaitu metode untuk menganalisis isi dari berbagai data, seperti data visual dan verbal (Harwood & Garry, 2003). Metode ini memungkinkan reduksi fenomena atau peristiwa ke dalam kategori-kategori yang ditentukan agar dapat dianalisis dan diinterpretasikan dengan lebih baik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk menjawab masalah pertama, ada empat tema, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Untuk menjawab masalah kedua, ada dua tema: kendala internet dan keterlambatan respon. Untuk menjawab masalah ketiga, ada dua tema berkaitan dengan solusi untuk mengatasi kendala: solusi internet dan keterlambatan respon.

### **Bagaimana Implementasi SIPD pada BPKAD Kota Bitung**

Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa informan menyatakan bahwa Implementasi SIPD pada BPKAD Kota Bitung telah diterapkan sejak tahun 2021 dan tidak menggunakan aplikasi lainnya sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Selama periode 2021–2023, aplikasi ini diberi nama SIPD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, mulai tahun 2024, tersebut diubah menjadi SIPD-RI. Sementara fitur, dan fungsi aplikasi tersebut tetap sama, perubahan utama terjadi pada tampilannya.

Salah satu perubahan yang paling menonjol dalam penggunaan SIPD ini adalah perubahan pada antarmuka penggunaan. Sebagai contoh, dengan dominasi warna merah yang kuat menampilkan identitas visual yang unik di layar utama aplikasi. Namun, setelah perubahan SIPD-RI pada tahun

2024 mengubah warna utama menjadi biru. Dengan perubahan ini, aplikasi akan berubah untuk mengimbangi desain dan preferensi pengguna. Ini membuat pengalaman pengguna lebih menarik dan intuitif. Meskipun hanya terjadi perubahan visual pada tampilan aplikasi, perubahan ini sangat penting untuk meningkatkan daya tarik dan kegunaan aplikasi bagi pengguna. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan pengguna akan lebih mudah menggunakannya dan memahami fungsinya.

Selain aspek fungsionalitas, penggunaan SIPD juga dipertimbangkan secara menyeluruh. BPKAD Kota Bitung sedang berusaha untuk meningkatkan fitur-fitur yang sudah ada agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pengguna dalam pengelolaan keuangan dan memungkinkan dengan yang efektif dan efisien. Dengan demikian, penerapan SIPD juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Jika ada perdebatan tentang adanya sistem yang diatur dan dikelola, serta informasi tentang penggunaan anggaran dan aset negara, perdebatan dapat dilakukan dengan mudah dan terbuka. Ini juga berlaku untuk warga masyarakat dan pihak lain. Hal ini membantu memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang kuat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah negara.

Berdasarkan berbagai peraturan dan ketentuannya, SIPD diyakini mampu memberikan dampak yang signifikan serta aspirasi yang besar dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, inovatif, aktif, efektif, dan akuntabel. Terutama dalam menjadikan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) lebih terbuka. Dalam konteks ini, transparansi mengacu pada keharusan untuk menghentikan penipuan karena laporan keuangan akan dinasionalisasi, sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pemerintahan negara untuk melakukan penipuan. Jejak geografis dipengaruhi oleh perdebatan yang luas mengenai pelaksanaan program dan penggunaan anggaran di wilayah tersebut.

Adanya SIPD menyebabkan BPKAD Bitung memiliki kemampuan untuk mengelola proses keuangan secara efisien dan terpadu. Dengan sistem ini, pihak-pihak terlibat dapat mengakses informasi dan bekerja sama secara efektif, yang memudahkan pengambilan keputusan strategis. Dengan peningkatan ini, BPKAD Bitung dapat menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penerapan SIPD oleh BPKAD Kota Bitung merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan menerapkan SIPD, diharapkan bahwa dengan terus membantu mengimbangi dan memperbarui penggunaan teknologi dan kebutuhan pengguna.

Implementasi suatu kebijakan dikatakan berhasil atau efektif apabila keempat aspek dalam teori implementasi (Edward III, 1980), yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi sesuai dengan harapan. Pada BPKAD Kota Bitung memiliki tim pengelolaan SIPD yang bekerja sesuai dengan tugas pokok. Selama pelaksanaan kebijakan SIPD, BPKAD selalu berkomunikasi dengan SKPD lain. Ini dilakukan untuk mengingatkan kepada mereka tentang pentingnya memasukan dan menginput data perencanaan. Selain itu, BPKAD menerima ketika SKPD datang untuk membicarakan pengelolaan SIPD, komunikasi dilakukan secara langsung atau secara virtual, seperti grup *whatsapp*. Hal ini sesuai dengan komunikasi dalam teori implementasi adalah ukuran seberapa jauh kebijakan peraturan dikomunikasikan secara konsisten, dengan penjelasan yang jelas, dan dengan cara yang sama. Edward III (1980) menyatakan bahwa dalam proses komunikasi kebijakan, tiga hal penting harus diperhatikan: transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Penelitian ini mendukung penelitian (Vitriana et al., 2022) yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan hal penting dalam keberhasilan penerapan suatu kebijakan.

Aspek sumber daya adalah sebagian besar sumber yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan ini sudah tersedia, dan BPKAD memiliki fasilitas dan sumber daya manusia yang sangat baik untuk menerapkan SIPD. Hanya saja, SKPD lain mengakui bahwa masih perlu banyak belajar tentang aplikasi web ini, walaupun BPKAD yang mengelolah, namun SKPD lain juga harus memahami cara menginput data perencanaan per bidang. Selain itu, ketersediaan informasi juga merupakan sumber daya yang harus dimiliki oleh BPKAD Kota Bitung. Adapun informasi yang disediakan oleh BPKAD Kota Bitung melalui SIPD adalah informasi keuangan daerah. Informasi keuangan daerah yang dimaksud adalah informasi perencanaan anggaran daerah, informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, informasi barang milik daerah dan informasi keuangan daerah lainnya. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Pasal 17 tentang informasi-informasi SIPD yang dikelola oleh BPKAD. Sesuai dengan aspek sumber daya pada teori implementasi Edward III (1980) Pelaksana kebijakan yang cukup dalam suatu organisasi dan memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan akan mendorong pelaksanaan kebijakan berhasil. Sumber daya tambahan adalah informasi; ini sangat penting untuk melaksanakan kebijakan. Ada informasi tentang kebijakan yang akan diterapkan, yaitu segala pesan, pedoman, petunjuk, dan tata cara pelaksanaan yang ditulis atau dikirim dengan tujuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, sarana dan prasarana yang terkandung dalam sumber daya berfungsi sebagai sumber untuk mendukung pelaksanaan

kebijakan. Semua sarana dan prasarana yang tersedia digunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan. (Karundeng et al., 2021) menyatakan bahwa implementasi SIPD berhasil jika tersedia pelaksana dan fasilitas pendukung lainnya.

Pada Aspek Sikap, BPKAD Kota Bitung sangat berhati-hati dalam menginput informasi dalam SIPD karena kesalahan dalam penginputan akan berdampak pada kesalahan penyajian informasi. BPKAD Kota Bitung menginput informasi sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri seperti ketepatan waktu penginputan. Antusias tersebut menunjukkan bahwa sikap pelaksana kebijakan SIPD pada BPKAD Kota Bitung tidak dipaksakan dan menerima kebijakan dengan baik. Sesuai dengan sikap oleh Edward III (1980) dalam teori implementasi bahwa cara para pelaksana melihat penerimaan dan pelaksanaan suatu kebijakan tanpa paksaan merupakan bukti keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Aspek struktur birokrasi Semuanya berjalan sesuai yang diharapkan, dan pelaksana hanya perlu mempelajari sistem informasi pemerintahan daerah ini lagi. BPKAD Kota Bitung bekerja sesuai dengan prosedur yang ada karena pelaksana yang egois dapat menyebabkan implementasi kebijakan tidak efektif. Hal ini mendukung teori implementasi yang menyatakan bahwa proses operasional, atau prosedur kerja baku standar, dan fragmentasi adalah dua ciri utama birokrasi. prosedur standar muncul sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber daya pelaksana serta keinginan untuk organisasi yang kompleks bekerja secara konsisten. Selain itu, ada fragmentasi ketika tugas dibagi antara unit di luar organisasi.

### **Kendala Implementasi SIPD pada BPKAD Kota Bitung**

Tujuan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Namun, banyak tantangan yang menghalangi pelaksanaannya, beberapa di antaranya adalah proses pengembangan sistem informasi yang membutuhkan koneksi yang kuat kadang terhambat di BPKAD Kota Bitung karena akses internet yang tidak stabil.

Selain itu, masalah yang dihadapi oleh BPKAD Kota Bitung karena rumor bahwa ada kesalahan atau kegagalan dalam Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPD). Untuk mengatasi masalah ini, BPKAD secara rutin berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melaporkan kesalahan atau memperbaiki kesalahan. Namun, proses komunikasi dengan Kemendagri kadang terlalu lama untuk menanggapi permintaan atau laporan yang diajukan, yang menyebabkan penundaan dalam penyelesaian masalah.



Karena respons Kemendagri yang tertunda, BPKAD Kota Bitung harus menunggu satu minggu untuk mendapatkan jawaban atas laporan yang dikirim. Masalah dapat ditangani setelah menerima tanggapan dari Kemendagri. Namun, akan membutuhkan waktu tambahan satu minggu untuk memperbaiki atau mengatasi masalah yang terjadi. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah atau kesalahan dalam SIPD bertambah lama, yang berdampak pada efisiensi dan efisiensi kerja di BPKAD.

### **Upaya untuk Mengatasi Masalah Implementasi SIPD di BPKAD Kota Bitung**

Jika Kemendagri tidak menanggapi atau merespon laporan, BPKAD dapat mendatangi langsung ke kantor Kemendagri untuk konsultasi langsung mengenai masalah tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa masalah SIPD dapat segera ditangani dan diselesaikan tanpa menunggu lama namun membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, diskusi yang dilakukan secara langsung dipusat memberikan manfaat tambahan bagi BPKAD karena peserta dapat berinteraksi langsung dengan para ahli dan lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan SIPD. Ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efisien dan mempercepat proses penyelesaian masalah. Sedangkan untuk mengatasi masalah koneksi yang tidak stabil maka BPKAD Kota Bitung dapat menaikkan jumlah kapasitas maksimum internet atau *bandwidth*.

Diharapkan BPKAD Kota Bitung dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan mendorong pendekatan yang lebih proaktif dan responsif terhadap masalah dalam SIPD. Upaya BPKAD ini bertujuan untuk memastikan sistem informasi keuangan daerah dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi yang optimal untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat Kota Bitung, meskipun terkadang ada hambatan dalam komunikasi dan respons dari pihak tertentu.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka implementasi SIPD pada BPKAD Kota Bitung dapat disimpulkan bahwa penerapan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan dapat dikatakan bahwa implementasi SIPD di BPKAD Kota Bitung berhasil jika dilihat dari empat aspek yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala antara lain koneksi internet yang tidak stabil, dan keterlambatan penyelesaian masalah oleh Kemendagri. Untuk mengatasi kendala tersebut maka BPKAD Kota Bitung dapat meningkatkan jumlah kapasitas internet atau mengganti dengan

provider lain yang kualitas jaringan internetnya lebih baik dari sebelumnya dan mendatangi secara langsung pada kantor Kemendagri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4036–4043.
- Balqis, N., Fadhly, Z., & Az, M. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 146–161. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1953>
- Chinda Aqhni Adisi, & Abdul Sadad. (2022). Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 150–164. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i2.581>
- EDWARD III, G. C. (1980). Implementing public policy. *Congressional Quarterly Press*.
- Harwood, T. G., & Garry, T. (2003). An Overview of Content Analysis. *Westburn Publishers Ltd*, 3(4), 479–498. <https://doi.org/https://doi.org/10.1362/146934703771910080>
- Ikriyati, T., & Aprilia, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Inzay, R., Yulivan, I., Saputro, G. E., Suwito, Purwantoro, S. A., & Prihantoro, K. (2022). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3573–3588.
- Karundeng, A. B., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, S. E. (2021). Implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36315>
- Mustaqmah, S. A., & Putri, D. P. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 8(2),

181–197. <https://doi.org/10.31869/me.v8i2.3738>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, 8 2071 (2014).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Seputra, N. K. S. K. A. (2020). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 12(1), 60–69.

Sidiq, U., & Chori, M. (2019). *METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN*. Nata Karya.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

Vitriana, N., Agustiawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947>